

# HUBUNGAN ELIT-RAKYAT DALAM SISTEM KENEGARAAN

Mengapa elit / pejabat penguasa harus bertanggungjawab kepada rakyat?

1. Tiga unsur pokok: wilayah, pemerintahan yang efektif, rakyat. Kesemuanya saling terkait
2. Legitimasi pemerintahan ditentukan oleh rakyat – *public office is public consent*
3. Sumberdaya dan pendanaan pemerintahan berasal dari rakyat. Kegiatan pemerintahan dibiayai melalui APBN/APBD, yang asalnya dari pajak dan retribusi.

# MENGAPA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MASIH RENDAH?

1. Para birokrat kebanyakan masih berorientasi kepada kekuasaan → Pergeseran dari “penguasa” ke “pelayan” masyarakat sangat sulit
2. Budaya paternalistik; laporan ABS, pemberian “upeti”, pengistimewaan atasan secara berlebihan
3. Kesenjangan yang lebar antara kebijakan, implementasi, dan kehendak masyarakat
4. Dilema politik vs. administrasi → kepentingan sempit (vested interest) sering didahulukan.

# TRANSPARANSI

- Definisi: presisi atau ketepatan yang dimiliki oleh rakyat atau masyarakat sehingga mereka bisa melihat atau mengakses informasi mengenai tindakan yang diambil oleh perumus kebijakan dan para birokrat. Jika suatu kegiatan bersifat transparan, maka semua informasi yang terkait dengannya akan tersedia bagi semua orang.
- Barrington Moore (1967: 1) effective checks and restraints on power holders; 2) mechanisms for replacement of illegitimate rulers; and 3) the participation of ordinary people in the making of rules.
- Empat pilar 'good governance' (UNDP): 1) accountability, 2) predictability, 3) public participation, and 4) transparency.

# MAKNA TRANSPARANSI SECARA EKONOMIS

- Akses masyarakat terhadap informasi merupakan instrumen bagi pembangunan ekonomi. Teori ekonomi (misalnya model Harrod-Domar) terlalu menekankan pada sumberdaya finansial bagi pertumbuhan ekonomi.
- Peran informasi sebagai sumberdaya sering diabaikan, sebagian karena adanya kepentingan elit yang sengaja menghambat arus informasi, pengetahuan dan kompetensi tertentu.
- Informasi semestinya dipandang sebagai sumberdaya yang sangat penting, seperti halnya modal atau aset. Joseph Stiglitz mengatakan bahwa banyak kerugian ekonomi di suatu negara yang disebabkan oleh adanya kesenjangan informasi.

# MAKNA TRANSPARANSI SECARA POLITIS / ADMINISTRATIF

1. Menjamin akuntabilitas pembuat keputusan kepada rakyat sehingga rakyat dapat mengontrol politisi dan birokrat
2. Menjamin mekanisme kawal dan imbang (*checks and balances*) sehingga tidak ada monopoli kekuasaan oleh para politisi/birokrat
3. Mengurangi korupsi
4. Meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.